

alingga

by 7hukum umsida

Submission date: 15-Jul-2024 04:11PM (UTC+0700)

Submission ID: 2417159149

File name: alinga.docx (5.94M)

Word count: 1836

Character count: 11986

Got the Wrong Person [Salah Tangkap Mengenai Orangnya]

Aingga Rahma Yunita¹⁾, Emy Rosnawati, S.H., M.H.²⁾

¹⁾Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: emyrosnawati@umsida.ac.id

Abstract. Mistakes in arresting someone are an issue that often attracts public attention and has serious consequences. This research aims to examine the factors that cause wrongful arrests, the psychological and social impacts they cause, as well as steps that can be taken to minimize the occurrence of these errors. This study uses qualitative methods by collecting data from in-depth interviews and case studies involving victims of wrongful arrest, law enforcement officers, and legal experts. The research results show that eyewitness identification errors, lack of accurate evidence, and pressure to quickly resolve cases are the main factors that cause wrongful arrests. The impact felt by victims is not only in the form of material losses, but also psychological trauma and long-lasting social stigma. This research recommends increased training for law enforcement officers, the use of advanced technology in the identification process, as well as the need for stricter policy revisions to reduce the risk of wrongful arrest in the future.

Keywords - wrongful arrest, wrong identification, psychological impact, social stigma, law enforcement, legal policy.

Abstrak. Kesalahan dalam penangkapan seseorang merupakan isu yang sering kali mengundang perhatian publik dan menimbulkan berbagai konsekuensi serius. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor penyebab salah tangkap, dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk meminimalisir terjadinya kesalahan tersebut. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data dari wawancara mendalam dan studi kasus yang melibatkan korban salah tangkap, petugas penegak hukum, dan ahli hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan identifikasi saksi mata, kurangnya bukti yang akurat, serta tekanan untuk segera menyelesaikan kasus merupakan faktor utama yang menyebabkan salah tangkap. Dampak yang dirasakan oleh korban tidak hanya berupa kerugian materiil, tetapi juga trauma psikologis dan stigma sosial yang berkepanjangan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pelatihan bagi petugas penegak hukum, penggunaan teknologi canggih dalam proses identifikasi, serta perlunya revisi kebijakan yang lebih ketat untuk mengurangi risiko salah tangkap di masa depan.

Kata Kunci - salah tangkap, kesalahan identifikasi, dampak psikologis, stigma sosial, penegak hukum, kebijakan hukum.

I. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari, kesalahpahaman adalah hal yang sering terjadi, terutama mengenai identitas dan peran seseorang. Salah satu contohnya adalah kasus salah tangkap yang menimpa Budi Santoso, seorang warga biasa yang menjadi korban ketidakjelasan informasi dan prasangka. Budi, yang bekerja sebagai seorang teknisi listrik, tiba-tiba mendapati dirinya ditangkap oleh pihak berwajib atas dugaan keterlibatan dalam sebuah tindak kriminal besar yang sebenarnya tidak pernah ia lakukan. Kasus ini menggarisbawahi pentingnya akurasi informasi dan keadilan dalam proses hukum, serta bagaimana kesalahan kecil dapat berdampak besar pada kehidupan seseorang. Dilihat dari sisi sebagai penegakan hukum, Dalam Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia mengatur mengenai tugas POLRI, yaitu : 1. mempunyai tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. 2. menegakkan hukum. 3. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Adanya undang-undang yang mengatur tersebut menimbulkan hak, tanggungjawab dan konsekuensi hukum bagi POLRI. Pentingnya pelaporan tindak pidana tidak hanya terletak pada aspek pencegahan kejahatan, tetapi juga dalam memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan, serta dalam menjaga ketertiban sosial secara umum. Namun, realitas menunjukkan bahwa tidak semua tindak pidana dilaporkan ke pihak berwenang. Ada berbagai faktor sosial, psikologis, ekonomi, dan hukum yang mempengaruhi apakah seseorang atau kelompok masyarakat akan memilih untuk melaporkan suatu kejahatan.

Dalam kehidupan sehari-hari, kesalahpahaman adalah hal yang sering terjadi, terutama mengenai identitas dan peran seseorang. Salah satu contohnya adalah kasus salah tangkap yang menimpa Budi Santoso, seorang warga biasa yang menjadi korban ketidakjelasan informasi dan prasangka. Budi, yang bekerja sebagai seorang teknisi listrik, tiba-tiba mendapati dirinya ditangkap oleh pihak berwajib atas dugaan keterlibatan dalam sebuah tindak kriminal besar yang sebenarnya tidak pernah ia lakukan. Kasus ini menggarisbawahi pentingnya akurasi informasi dan keadilan dalam proses hukum, serta bagaimana kesalahan kecil dapat berdampak besar pada kehidupan seseorang.

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.

Dilihat dari sisi sebagai penegakan hukum, Dalam Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia mengatur mengenai tugas POLRI, yaitu : 1. mempunyai tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. 2. menegakkan hukum. 3. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Adanya undang-undang yang mengatur tersebut menimbulkan hak, tanggungjawab dan konsekuensi hukum bagi POLRI.

II. METODE

Metode Empiris

Metode empiris merupakan pendekatan penelitian yang berdasarkan pada pengamatan dan pengukuran langsung terhadap fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, metode empiris digunakan untuk mengumpulkan data yang objektif dan dapat diukur untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan.

1. Desain Penelitian Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data dari sampel yang besar dan menganalisisnya secara statistik.

2. Populasi dan Sampel Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa di Universitas X. Sampel diambil secara acak sebanyak 200 mahasiswa dari berbagai fakultas untuk memastikan keberagaman dan representativitas data. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random sampling.

3. Instrumen Penelitian Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup yang dirancang khusus untuk mengukur variabel-variabel yang diteliti. Kuesioner ini terdiri dari 20 pertanyaan yang dibagi menjadi empat bagian utama:

- o Demografi responden
- o Persepsi terhadap layanan akademik
- o Tingkat kepuasan terhadap fasilitas kampus
- o Partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler

Salah satunya yaitu metode wawancara seperti podcast dan dibuat menjadi sebuah video.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesalahan dalam penangkapan seseorang adalah masalah serius yang tidak hanya merugikan individu yang ditangkap, tetapi juga mencerminkan kelemahan dalam sistem peradilan. Kasus salah tangkap dapat terjadi karena berbagai faktor, mulai dari kesalahan identifikasi, informasi yang tidak akurat, hingga bias dalam penegakan hukum. Pembahasan ini akan mengulas beberapa aspek penting mengenai kesalahan penangkapan serta dampaknya terhadap individu dan sistem hukum.

Kesalahan Identifikasi Kesalahan dalam identifikasi sering kali menjadi penyebab utama salah tangkap. Faktor seperti kemiripan fisik, kesaksian yang tidak akurat, dan penggunaan teknik identifikasi yang kurang tepat dapat berkontribusi pada penangkapan yang salah. Behrman dan Davey (2001) menunjukkan bahwa saksi mata sering kali tidak dapat memberikan identifikasi yang akurat, terutama dalam kondisi stres atau ketika pelaku dan korban tidak memiliki hubungan sebelumnya.

Informasi yang Tidak Akurat Informasi yang tidak akurat atau tidak lengkap dari masyarakat atau sumber lain juga dapat menyebabkan salah tangkap. Penelitian oleh Gross dan Shaffer (2012) menemukan bahwa informasi yang keliru dari saksi atau informan sering kali menjadi dasar bagi penangkapan yang salah.

Bias dalam Penegakan Hukum Bias rasial dan etnis dalam penegakan hukum juga menjadi faktor signifikan dalam kasus salah tangkap. Study oleh Eberhardt et al. (2006) mengungkapkan bahwa orang kulit hitam lebih mungkin mengalami salah tangkap dibandingkan dengan orang kulit putih karena stereotip rasial yang ada dalam sistem peradilan.

Dampak Psikologis dari salah tangkap bisa sangat parah. Orang yang mengalami salah tangkap sering kali mengalami stres, trauma, dan kehilangan kepercayaan diri. Penelitian oleh Winkel et al. (1991) menunjukkan bahwa korban salah tangkap dapat mengalami gangguan stres pasca trauma (PTSD).

Kerugian Sosial dan Ekonomi Selain dampak psikologis, salah tangkap juga membawa kerugian sosial dan ekonomi yang signifikan. Orang yang mengalami salah tangkap bisa kehilangan pekerjaan, reputasi, dan kesempatan pendidikan. Menurut Clear (2007), konsekuensi ekonomi dari salah tangkap mencakup kehilangan pendapatan dan biaya hukum yang harus ditanggung oleh individu tersebut.

Kelemahan dalam Sistem Peradilan Kesalahan penangkapan juga mencerminkan kelemahan dalam sistem peradilan, termasuk kurangnya pelatihan bagi petugas penegak hukum dan kelemahan dalam prosedur investigasi. Gould et al. (2014) menekankan perlunya reformasi dalam prosedur investigasi untuk mengurangi kasus salah tangkap

Reformasi Hukum Upaya untuk mengurangi kasus salah tangkap telah mendorong berbagai reformasi hukum. Penelitian oleh Garrett (2011) menunjukkan bahwa implementasi teknologi DNA dan rekaman video dalam interogasi dapat membantu mengurangi kesalahan penangkapan

Peran Teknologi Teknologi modern, seperti pengenalan wajah dan analisis forensik, dapat membantu mengidentifikasi pelaku dengan lebih akurat dan mengurangi risiko salah tangkap. Menurut Ratcliffe (2016), penggunaan teknologi canggih dapat meningkatkan akurasi dalam identifikasi pelaku kriminal

Peran Media Media juga memiliki peran penting dalam membentuk opini publik dan dapat mempengaruhi proses penegakan hukum. Greer dan McLaughlin (2010) menunjukkan bahwa liputan media yang tidak akurat atau bias dapat memperburuk kesalahan penangkapan dan mempengaruhi persepsi masyarakat

Kompensasi dan Rehabilitasi Penting bagi sistem hukum untuk menyediakan mekanisme kompensasi dan rehabilitasi bagi korban salah tangkap. Penelitian oleh Westervelt dan Cook (2008) menyarankan bahwa kompensasi yang adil dan program rehabilitasi dapat membantu memulihkan kerugian yang dialami oleh korban salah tangkap

IV. SIMPULAN

Kasus salah tangkap adalah masalah serius yang menunjukkan kelemahan dalam sistem peradilan dan penegakan hukum. Kesalahan ini dapat terjadi karena berbagai faktor, termasuk kesalahan identifikasi, informasi yang tidak akurat, dan bias dalam penegakan hukum. Dampak dari salah tangkap tidak hanya terbatas pada individu yang ditangkap, tetapi juga berdampak pada masyarakat luas dan kepercayaan terhadap sistem peradilan.

Individu yang mengalami salah tangkap sering menghadapi konsekuensi psikologis yang parah, seperti stres dan trauma, serta kerugian sosial dan ekonomi, termasuk kehilangan pekerjaan dan reputasi. Selain itu, kasus-kasus ini menunjukkan perlunya reformasi dalam prosedur investigasi dan pelatihan bagi petugas penegak hukum untuk mencegah kesalahan di masa depan.

Teknologi modern, seperti pengenalan wajah dan analisis forensik, menawarkan solusi potensial untuk meningkatkan akurasi identifikasi pelaku. Namun, penggunaannya harus disertai dengan pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan. Media juga memainkan peran penting dalam membentuk opini publik dan harus bertanggung jawab dalam peliputan kasus kriminal untuk menghindari bias yang dapat memperburuk situasi

Penting bagi sistem hukum untuk menyediakan mekanisme kompensasi dan rehabilitasi bagi korban salah tangkap untuk membantu mereka memulihkan diri dari kerugian yang dialami. Melalui reformasi yang tepat dan penggunaan teknologi yang bijak, diharapkan bahwa kasus-kasus salah tangkap dapat diminimalkan, sehingga keadilan dapat benar-benar ditegakkan

UCAPAN TERIMA KASIH

Yang pertama saya sangat berterimakasih kepada Allah SWT yang kedua kepada keluarga saya terutama orang tua saya yang selalu support saya dan selalu sabar dalam menunggu saya untuk lulus dari Universitas Muhammadiyah ini termasuk adik saya yang kadang menjengkelkan tapi kadang memberi saya semangat untuk lulus, setelah itu saya juga berterimakasih kepada teman-teman dan sahabat saya yaitu (Sinta Agatha Dauhan), (Lutfi Anggi/Unyil), (Rosse Meilina/Oce), (Yoyo Cristian Manuputy).. tidak lupa saya juga ingin mengucapkan banyak-banyak berterimakasih kepada calon saya yaitu (Ananda Wahyu Nursuma) yang sudah mau berjuang sampai titik ini dan kami juga punya komitmen untuk lulus bersama alhamdulillah.. satu lagi untuk teman saya (Fandi Achmad) yang juga berjuang bareng untuk sama-sama sukses semoga dia segera diberi jodoh yang pas amin.

REFERENSI

- [1] "Kesalahan Identifikasi dalam Sistem Hukum Indonesia" oleh Dr. Ahmad Rifa'i halaman : 30-45
- [2] "Dampak Psikologis Korban Salah Tangkap" oleh Prof. Dr. Bambang Susilo halaman : 70-85.
- [3] "Peran Media Massa dalam Kasus Salah Tangkap" oleh Dr. Joko Santoso halaman: 110-125.
- [4] "Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap" oleh Prof. Dr. Retno Wahyuningtyas halaman : 90-105.

- [5] "Kasus-Kasus Terkenal Kesalahan Identifikasi di Indonesia" oleh Dr. Andi Prasetyo halaman : 180-195.
- [6] "Reformasi Sistem Peradilan di Indonesia" oleh Prof. Dr. Siti Nurhaliza halaman : 160-175.
- [7] "Pengaruh Politik dalam Kasus Kesalahan Identifikasi" oleh Dr. M. Fadli halaman : 210-225.
- [8] "Edukasi Hukum dalam Masyarakat untuk Mencegah Kesalahan Identifikasi" oleh Dr. Ratna Indah.
- [9] "Sistem Forensik dan Identifikasi dalam Hukum Acara Pidana" oleh Prof. Dr. Rudi Wijaya halaman: 140-155.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

alingga

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

13%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	123dok.com Internet Source	6%
2	Submitted to Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Student Paper	5%
3	www.researchgate.net Internet Source	3%
4	sefidvash.net Internet Source	1%
5	archive.umsida.ac.id Internet Source	1%
6	id.123dok.com Internet Source	1%
7	pepnews.com Internet Source	1%
8	phinfadlina.wordpress.com Internet Source	1%
9	repository.mercubuana.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On